

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji model penyelesaian sengketa konflik sosial pada masyarakat nelayan di Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Penelitian ini berangkat dari realitas adanya perselisihan yang berulang di kalangan nelayan, terutama pada musim ikan ketika persaingan dalam memanfaatkan wilayah tangkap meningkat. Meskipun perselisihan tersebut muncul secara berkala, penyelesaiannya secara konsisten dilakukan melalui mekanisme adat tanpa melibatkan lembaga hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa serta menganalisis model penyelesaian yang diterapkan dalam komunitas nelayan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Panglima Laot, nelayan, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terlembagakan dalam sistem pemerintahan adat laut yang dipimpin oleh Panglima Laot. Mekanisme seperti *Suloh* (perdamaiian), musyawarah adat, serta *Peusijuk* dan *Peumat Jaroe* sebagai simbol rekonsiliasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian. Model penyelesaian sengketa yang diterapkan bersifat bertahap dan kontekstual. Perselisihan yang bersifat ringan diselesaikan melalui kesepakatan langsung antar pihak, sedangkan persoalan yang lebih kompleks diselesaikan melalui forum musyawarah adat. Model ini menekankan dialog, pembentukan kesepakatan bersama, pemulihan hubungan sosial, serta kepatuhan kolektif terhadap *hukom* adat laot. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal tersebut menunjukkan efektivitas kelembagaan dalam menjaga kohesi sosial serta mencegah meluasnya perselisihan di kalangan masyarakat nelayan. Keberlanjutan model ini ditopang oleh legitimasi adat yang kuat, kepercayaan sosial, dan internalisasi norma-norma adat dalam kehidupan komunitas. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian resolusi konflik berbasis komunitas serta menegaskan relevansi sistem pemerintahan adat dalam pengelolaan sengketa sosial berbasis sumber daya.

Kata kunci: Model penyelesaian sengketa, Konflik sosial, Masyarakat nelayan, Kearifan lokal, Panglima Laot.

ABSTRACT

This study examines the model of social conflict dispute resolution within the fishing community of Lhok Simpang Mamplam, Bireuen Regency. The research is grounded in the recurring disputes among fishermen, particularly during peak fishing seasons when competition over fishing grounds intensifies. Despite the periodic emergence of such disputes, conflicts are consistently resolved through customary mechanisms without recourse to formal legal institutions. The study aims to identify the forms of local wisdom embedded in the dispute resolution process and to analyze the underlying model applied by the community. A qualitative research design was employed, utilizing in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. Informants included the Panglima Laot (customary sea leader), fishermen, and local community figures. The findings reveal that dispute resolution is institutionalized through the customary sea governance system led by the Panglima Laot. Mechanisms such as Suloh (peace), customary deliberation forums, and Peusijuk, Peumat Jaroe (symbolic reconciliation) function as integral components of the process. The dispute resolution model operates in a staged and context-sensitive manner: minor disputes are settled directly through mutual agreement at the site of occurrence, while more complex cases are addressed through formal customary deliberation. The model emphasizes dialogue, consensus-building, restoration of social relations, and collective adherence to Hukom Adat Laot (customary sea law). This study concludes that the local wisdom-based dispute resolution model demonstrates institutional effectiveness in maintaining social cohesion and preventing conflict escalation within the fishing community. The sustainability of this model is supported by strong customary legitimacy, social trust, and community compliance with established norms. The findings contribute to the broader discourse on community-based conflict resolution and highlight the relevance of indigenous governance systems in managing resource-based social disputes.

Keywords: Dispute resolution model, Social conflict, Fishing community, Local wisdom, Panglima Laot.